

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Data dan Sampel

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung yang akan diisi oleh responden yang merupakan pegawai bagian keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesawaran.

Tabel 4.1

Daftar Nama OPD dan Pengembalian Kuesioner

No	Nama OPD	Sebar	Tidak Kembali	Bias	Data di Olah	Presentase
1	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5	-	-	5	3,13%
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5	-	-	5	3,13%
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	5	-	-	5	3,13%
4	Dinas Perikanan	5	-	-	5	3,13%
5	Dinas Kesehatan	5	-	-	5	3,13%
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	-	-	5	3,13%

7	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	5	-	-	5	3,13%
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	-	-	5	3,13%
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	-	-	5	3,13%
10	Dinas Pariwisata	5	-	-	5	3,13%
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	-	-	5	3,13%
12	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	-	-	5	3,13%
13	Dinas Perhubungan	5	-	-	5	3,13%
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5	5	-	-	
15	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5	-	-	5	3,13%
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	-	-	5	3,13%
17	Dinas Sosial	5	-	-	5	3,13%
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	-	5	-	

19	Perpustakaan dan Kearsipan	5	-	5	-	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	-	-	
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	-	-	5	3,13%
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	-	-	5	3,13%
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	5	-	5	3,13%
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	-	-	5	3,13%
25	Badan Pendapatan Daerah	5	5	-	-	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5	5	-	-	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	-	-	5	3,13%
28	Sekretariat DPRD	5	-	-	-	
29	Sekretariat Daerah	5	-	-	5	3,13%
30	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	5	-	5	-	
31	Inspektorat	5	-	-	5	3,13%
32	Satuan Polisi Pamong Praja	5	-	-	5	3,13%
Total		160	25	15	120	75,00%

Sumber: Data diolah 2022

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini telah melakukan penyebaran kuesioner pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022 sebanyak 160 kuesioner. Berdasarkan hasil rekapitulasi responden tersebut sebanyak 25 kuesioner tidak kembali dan 15 kuesioner bias maka dapat disimpulkan sampel pada penelitian ini terdapat 120 responden yang dapat diolah.

4.1.2 Identitas Responden

Dari penelitian ini didapat identitas responden untuk memberikan gambaran atau keadaan dari setiap responden yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesawaran. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan ketentuan kriteria yang telah ditentukan. Karakteristik responden tersebut meliputi jenis kelamin, Status, Umur, Masa Kerja, Golongan PNS, dan Pendidikan terakhir.

Tabel 4.2

Profil Responden

Kategori	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Pria	59	49%
Wanita	61	51%
Total	120	100%
Status		
PNS	85	71%
Tenaga Kerja Kontrak	35	29%
Total	120	100%
Umur		
<30 Tahun	26	22%
30-40 Tahun	57	48%
41-50 Tahun	32	27%
>50 Tahun	5	4%

Total	120	100%
Masa Kerja		
1-4 Tahun	12	10%
5-10 Tahun	46	38%
>10 Tahun	62	52%
Total	120	100%
Golongan PNS		
I	0	0%
II	7	8%
III	62	73%
IV	16	19%
Total	85	100%
Pendidikan Terakhir		
SLTA	18	15%
D3	12	10%
S1	61	51%
S2	29	24%
S3	0	0%
Total	120	100%

Sumber: Data Primer (Diolah, 2022)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat hasil responden menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja pada bagian keuangan di OPD Kabupaten Pesawaran lebih dominan memiliki jenis kelamin wanita yang berjumlah 61 pegawai atau sebesar 51% lebih banyak jika dibandingkan dengan responden pria yang berjumlah 59 pegawai atau sebesar 49%. Sedangkan pada status pekerjaan, responden yang berstatus sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) berjumlah 35 pegawai atau sebesar 29% dan jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan responden yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 85 pegawai atau sebesar 71%. Hasil ini menggambarkan bahwa pada OPD Kabupaten Pesawaran lebih banyak pegawai pada bagian keuangan yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan kategori umur, dapat dilihat bahwa responden yang berumur dibawah 30 tahun berjumlah 26 pegawai atau sebesar 22%, dan responden yang berumur 30 tahun sampai 40 Tahun sebesar 57 pegawai atau sebesar 48%, yang berumur 41 tahun sampai dengan 50 tahun berjumlah 32 pegawai atau sebesar 27%, sedangkan yang berumur diatas 50 tahun berjumlah 5 pegawai atau sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai pada bagian keuangan di OPD Kabupaten Pesawaran terdapat pegawai yang berumur 30 tahun sampai dengan 40 tahun.

Berdasarkan masa kerja terlihat bahwa responden yang memiliki masa kerja 1 tahun sampai 4 tahun sebanyak 12 pegawai atau sebesar 10%, sedangkan 5 sampai 10 tahun berjumlah 46 pegawai, dan yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 62 pegawai atau sebesar 52%. Hasil dari data tersebut dapat diketahui bahwa para pegawai bagian keuangan di OPD Kabupaten Pesawaran memiliki masa kerja paling banyak berkisar lebih dari 10 tahun. Sedangkan untuk golongan PNS terlihat bahwa responden golongan II berjumlah 7 pegawai atau sebesar 8%, sedangkan untuk golongan III sebanyak 62 pegawai atau 73% dan pada golongan IV terdapat 16 pegawai atau sebesar 19%.

Berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan bahwa responden yang memiliki pendidikan akhir SLTA berjumlah 18 pegawai atau sebesar 15%, sedangkan responden yang berpendidikan akhir D3 berjumlah 12 pegawai atau sebesar 10%, responden yang memiliki pendidikan akhir S1 sebanyak 61 pegawai atau sebesar 51% dan responden yang memiliki pendidikan akhir S2 berjumlah 29 pegawai atau sebesar 34%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai bagian keuangan pada OPD Kabupaten Pesawaran lebih banyak berpendidikan terakhir S1.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Evaluasi *Outer Model*

Dalam analisis data perlu dilakukan evaluasi model pengukuran untuk mengetahui hubungan antara konstruk dan indikatornya. Evaluasi *outer model* dilakukan untuk

menilai validitas dan reabilitas model. Dengan menggunakan dua tahap yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*.

4.2.1.1 *Convergent Validity*

Untuk menguji *Convergent Validity* menggunakan ketentuan yang ditetapkan bahwa data dinyatakan valid apabila *convergen validity* dari model pengukuran dengan refleksi indikator dapat dilihat dari korelasi antara score item/ indikator dengan score konstraknya. Indikator individu dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi di atas 0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima (Ghozali, 2015).

Tabel 4.3

Outer Loading Tahap Pertama

Indikator	Outer Loading
X1	0.406
X10	0.600
X11	0.409
X12	0.453
X13	0.517
X14	0.571
X15	0.586
X16	0.630
X17	0.537
X18	0.504
X19	0.525
X2	0.548
X20	0.507
X21	0.555
X22	0.461
X23	0.422

X24	0.379
X25	0.555
X26	0.589
X27	0.577
X28	0.626
X29	0.502
X3	0.406
X30	0.574
X31	0.502
X32	0.653
X33	0.491
X34	0.592
X35	0.661
X36	0.570
X37	0.433
X38	0.600
X4	0.575
X5	0.496
X6	0.510
X7	0.472
X8	0.555
X9	0.560
Y1	0.652
Y10	0.536
Y11	0.517
Y12	0.538
Y13	0.298
Y14	-0.166
Y15	-0.139
Y16	0.556

Y17	0.605
Y18	0.607
Y19	0.653
Y2	0.729
Y20	0.583
Y21	0.586
Y3	0.618
Y4	0.570
Y5	0.655
Y6	0.706
Y7	0.703
Y8	0.658
Y9	0.655

Sumber Data: Olah Data Smartpls3

Berdasarkan outer Loading tahap pertama, menunjukkan bahwa variabel E-government terdapat indikator yang mempunyai nilai kurang dari 0,5. Indikator tersebut adalah X1, X11, X12, X22, X23, X24, X3, X33, X37, X5, X7 artinya ke-11 indikator tersebut memiliki *convergent validity* yang kurang baik sehingga harus dieliminasi dari pengujian selanjutnya. Pada variabel akuntabilitas keuangan, indikator Y13, Y14, dan Y15 mempunyai nilai kurang dari 0,5 artinya ke-3 indikator tersebut memiliki *convergent validity* yang kurang baik sehingga harus dieliminasi dari pengujian selanjutnya.

Tabel 4.4**Outer Loading Tahap Kedua**

Indikator	Outer Loading
X10	0.599
X13	0.490
X14	0.595
X15	0.597
X16	0.635
X17	0.555
X18	0.505
X19	0.516
X2	0.565
X20	0.500
X21	0.535
X25	0.576
X26	0.598
X27	0.597
X28	0.627
X29	0.515
X30	0.596
X31	0.496
X32	0.648
X34	0.601
X35	0.685
X36	0.587
X38	0.626
X4	0.571
X6	0.496
X8	0.568

X9	0.566
Y1	0.646
Y10	0.536
Y11	0.516
Y12	0.526
Y16	0.572
Y17	0.619
Y18	0.614
Y19	0.652
Y2	0.733
Y20	0.593
Y21	0.597
Y3	0.617
Y4	0.578
Y5	0.636
Y6	0.706
Y7	0.714
Y8	0.664
Y9	0.651

Sumber Data: Olah Data Smartpls3

Berdasarkan outer loading tahap kedua pada tabel diatas, menunjukan bahwa pada variabel e-government terdapat indikator X13, X31, dan X6 yang mempunyai nilai kurang dari 0,5 artinya indikator tersebut memiliki *convergent validity* yang kurang baik sehingga harus dieliminasi. Pada variabel akuntabilitas keuangan menunjukan bahwa semua indikator yang tersisa mempunyai nilai lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator memiliki *convergent validity* yang baik.

Tabel 4.5**Outer Loading Tahap Ketiga**

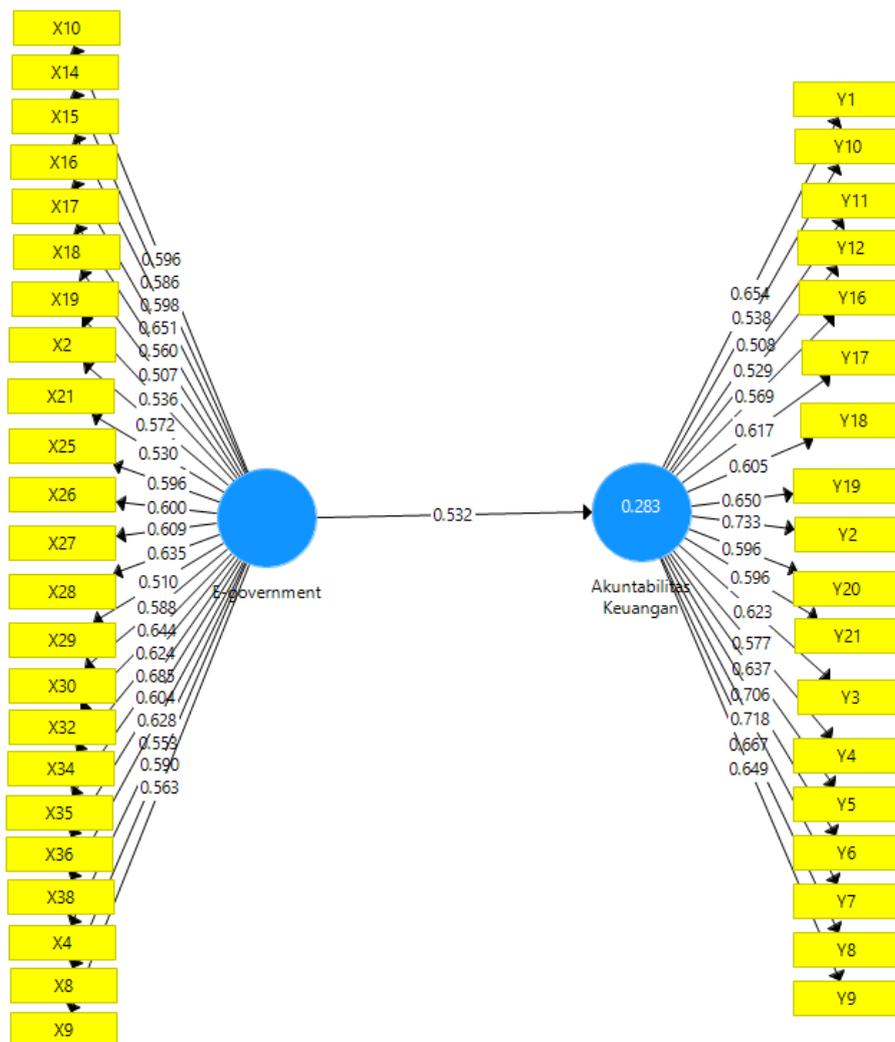
Indikator	Outer Loading
X10	0.596
X14	0.586
X15	0.598
X16	0.651
X17	0.560
X18	0.507
X19	0.536
X2	0.572
X21	0.530
X25	0.596
X26	0.600
X27	0.609
X28	0.635
X29	0.510
X30	0.588
X32	0.644
X34	0.624
X35	0.685
X36	0.604
X38	0.628
X4	0.553
X8	0.590
X9	0.563
Y1	0.654
Y10	0.538
Y11	0.508

Y12	0.529
Y16	0.569
Y17	0.617
Y18	0.605
Y19	0.650
Y2	0.733
Y20	0.596
Y21	0.596
Y3	0.623
Y4	0.577
Y5	0.637
Y6	0.706
Y7	0.718
Y8	0.667
Y9	0.649

Sumber Data: Olah Data Smartpls3

Berdasarkan *outer loading* tahap ketiga pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa semua indikator yang tersisa mempunyai nilai lebih dari 0,5, yang berarti bahwa semua indikator mempunyai *convergent validity* yang baik, sehingga seluruh indikator dinyatakan layak dapat digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis ke tahap lebih lanjut.

Gambar 4.1

Output SmartPLS

Sumber: SmartPLS3

Berdasarkan *Outer Loading* tahap ketiga, diketahui bahwa masing-masing indikator variabel yang tersisa mempunyai nilai lebih dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator memiliki *convergent validity* yang baik. Sehingga seluruh indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian.

4.2.1.2 Discriminant Validity

Discriminant validity merupakan model pengukuran dengan refleksi indikator yang di nilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Suatu indikator dapat dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai *cross loading* pada setiap indikator masing-masing variabel paling besar dibandingkan pada variabel lainnya.

Tabel 4.6
Cross Loading

	Akuntabilitas Keuangan (Y)	E-government (X)
X10	0.318	0.596
X14	0.323	0.586
X15	0.439	0.598
X16	0.334	0.651
X17	0.241	0.560
X18	0.421	0.507
X19	0.325	0.536
X2	0.219	0.572
X21	0.274	0.530
X25	0.328	0.596
X26	0.200	0.600
X27	0.213	0.609
X28	0.276	0.635
X29	0.188	0.510
X30	0.226	0.588
X32	0.340	0.644
X34	0.280	0.624
X35	0.390	0.685
X36	0.326	0.604
X38	0.455	0.628

X4	0.274	0.553
X8	0.178	0.590
X9	0.181	0.563
Y1	0.654	0.448
Y10	0.538	0.205
Y11	0.508	0.393
Y12	0.529	0.346
Y16	0.569	0.324
Y17	0.617	0.282
Y18	0.605	0.305
Y19	0.650	0.318
Y2	0.733	0.380
Y20	0.596	0.233
Y21	0.596	0.299
Y3	0.623	0.347
Y4	0.577	0.232
Y5	0.637	0.240
Y6	0.706	0.303
Y7	0.718	0.290
Y8	0.667	0.436
Y9	0.649	0.335

Sumber Data: Olah Data SmartPLS3

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator setiap variabel memiliki nilai *cross loading*. Dapat dinyatakan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki nilai *discriminant validity* yang baik dalam setiap variabel masing-masing.

Tabel 4.7
Nilai Korelasi Variabel Konstruk
Dibandingkan Dengan Akar AVE

	Akuntabilitas Keuangan	E-government
Akuntabilitas Keuangan	0.624	
E-government	0.532	0.591

Sumber Data: Olah Data SmartPLS3

Selain nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat dilihat melalui metode lain yaitu dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik apabila nilai *AVE* lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2015).

4.2.1.3 Reliabilitas

Evaluasi terakhir pada *outer model* adalah *cronbach alpha* dan *composite reliability*. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dengan menggunakan uji statistik *cronbach alpha* dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach alpha* adalah diatas 0,7 (Ghozali, 2015). Berikut adalah nilai *cronbach alpha* dan *composite reliability* masing-masing variabel.

Tabel 4.8
Cronbach Alpha dan Composite Reliability

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
AKUTABILITAS (Y)	0.907	0.919
E-GOVERNMENT(X)	0.922	0.929

Sumber data: Olah data smartPLS3

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,7 menunjukkan bahwa pengukuran dari masing-masing

konstruk berkorelasi tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reabilitas yang baik.

4.2.2 Evaluasi *Inner Model*

Evaluasi model struktural (*inner model*) bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel laten. Model struktural dalam smartPLS dievaluasi dengan menggunakan nilai *R Square* (R^2) untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependennya.

Tabel 4.9

Nilai *R Square*

	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0.283	0.276

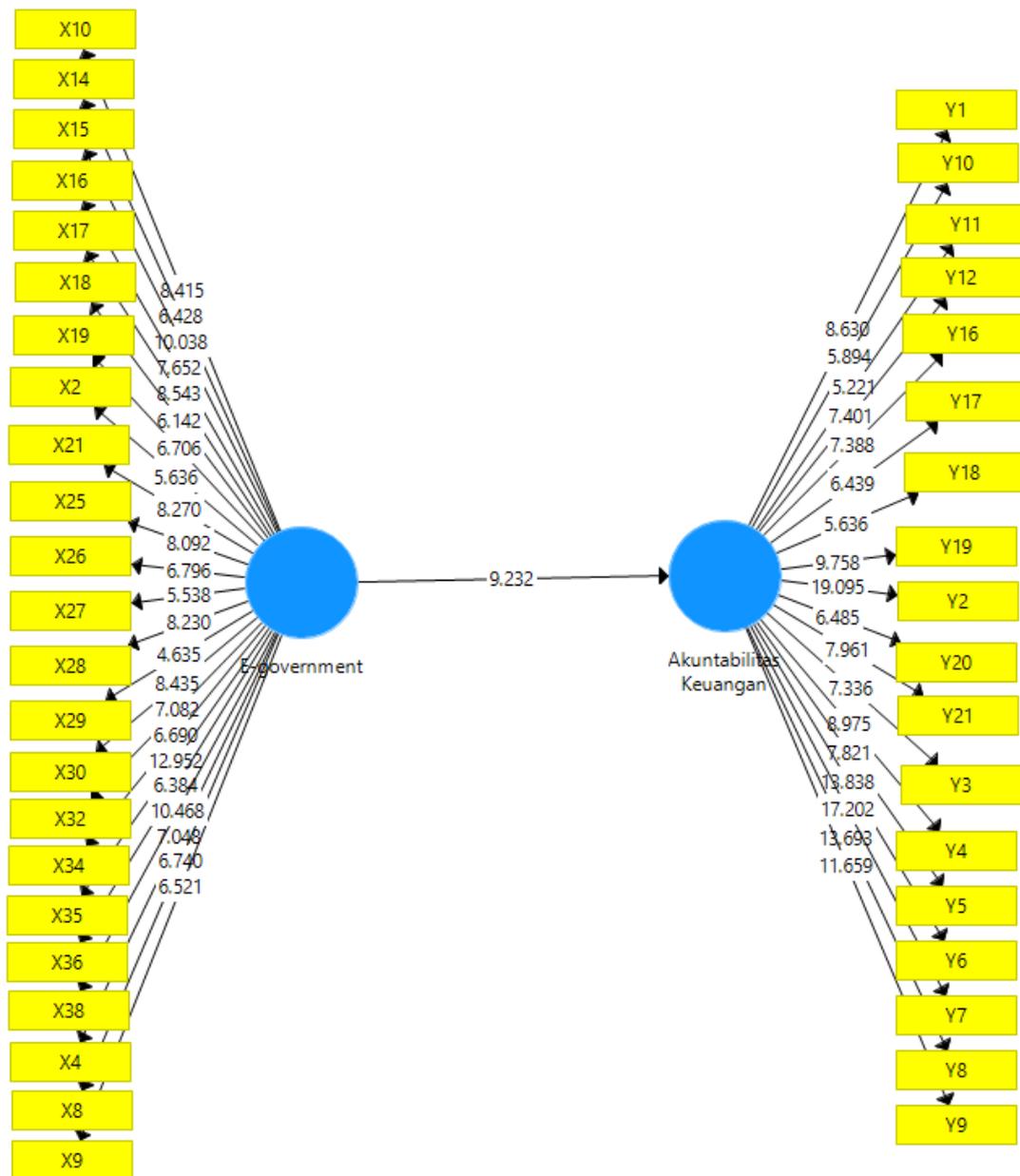
Sumber Data: Olah Data SmartPLS3

Berdasarkan tabel diatas, nilai R Square sebesar 0.283 yang berarti bahwa e-government berpengaruh sebesar 0,283 (28,3%) terhadap akuntansi keuangan.

4.3 Hipotesis

Gambar 4.2

Bootstapping



Sumber: Hasil Bootstrapping SmartPLS3

Tabel 4.10

Nilai Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
E-government -> Akuntabilitas Keuangan	0.532	0.576	0.060	8.879	0.000

Sumber Data: Olah Data SmartPLS3

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

Pengaruh e-government (X) terhadap akuntabilitas keuangan (Y). Hipotesis ini memiliki nilai *T statistics* sebesar 8.879 ($8,879 > 1,96$) dan nilai *P value* sebesar 0.000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti bahwa e-government (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y).

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Penerapan E-government Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hipotesis dalam penelitian ini yaitu pengaruh penerapan *E-government* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, diperoleh hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa H1 diterima, hal ini dibuktikan dengan nilai (*P-Value*) kurang dari 5% sehingga diperoleh kesimpulan bahwa penerapan *E-government* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Dengan sampel 120 responden pada OPD Kabupaten Pesawaran maka diperoleh hasil semakin baik akuntabilitas keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang di pengaruhi oleh penerapan *e-government* menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah bertujuan untuk mempermudah proses

komunikasi antara pemerintah dengan para stakeholder, pentingnya penerapan *e-government* pada birokrasi instansi agar terwujudnya *Good Government Governance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ferdiansyah, 2020) yang menyatakan bahwa masyarakat juga dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat saling memonitoring dan mengontrol pengelolaan keuangan.

Dalam mewujudkan penerapan *e-government* di OPD Kabupaten Pesawaran. Perlu diperhatikan beberapa hal untuk memastikan bahwa benar penerapan *e-government* itu berjalan dengan semestinya. Sehingga perlu diperhatikan dimensi penerapan *e-governement*. Adapun 3 dimensi penerapan *e-government*:

1. Dimensi *Support*

Element support merupakan dimensi yang paling penting dalam menjalankan penerapan *e-government*, dalam penerapan *e-government* di suatu instansi pemerintah sangat diperlukan kemauan dari pimpinan setiap instansi tersebut dalam mendukung penerapan *e-government*. Di pemerintahan Kabupaten Pesawaran telah menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyajian dan penyampaian informasi publik. Sebagai badan publik pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak dapat mengembangkan situs *web* tanpa memiliki pedoman. Pedoman yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat dalam mengembangkan situs *web* salah satu upaya untuk penerapan *e-government* terdapat pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ketiga Undang – Undang digunakan untuk mengacu pada pedoman pengembangan *web* pemerintah Kabupaten Pesawaran.

2. Dimensi *Capacity* (Sumber Daya)

Penerapan *e-government* di instansi pemerintah tentunya memerlukan sumber daya yang cukup untuk menjalankan inovasi tersebut dimana sumber daya manusia yang baik. Dalam penerapan *e-government* Kabupaten Pesawaran sudah memiliki sumber daya infrastruktur teknologi informasi bisa dilihat dari

website Pemerintah Kabupaten Pesawaran di setiap OPD sudah mempunyai *website* masing-masing (Sumber: pesawrankab.go.id).

3. Dimensi Value (Manfaat)

Dimensi manfaat adalah dimensi yang menentukan besarnya manfaat yang diterima oleh instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai pemberi pelayanan online ini memberikan dampak yang signifikan dari segi pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.